

**STRATEGI NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO)  
DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs TUJUAN 5 DI  
INDONESIA  
(STUDI KASUS: WOMEN RESEARCH INSTITUTE)**



**SKRIPSI**

*Disusun sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada  
Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

**Oleh:**

**HANUUN HANIIFAH TAUHID**

**E061181337**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO)  
DALAM Mendukung Pencapaian SDGs TUJUAN 5 DI  
INDONESIA (STUDI KASUS : WOMEN RESEARCH  
INSTITUTE)

N A M A : HANUUN HANIIFAH TAUHID

N I M : E061181337

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 27 Januari 2023



Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D**  
NIP. 197602022000122003

  
**Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197101092008012005

Mengesahkan :  
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



  
**Prof. H. Darwis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : STRATEGI NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO)  
DALAM Mendukung Pencapaian SDGs Tujuan 5 di  
Indonesia (STUDI KASUS : WOMEN RESEARCH  
INSTITUTE)

N A M A : HANUUN HANIIFAH TAUHID

N I M : E061181337

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 16 Januari 2023.

TIM EVALUASI

Ketua : Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D .....

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR.....

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D .....

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si .....

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si .....

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanuun Haniifah Tauhid  
Nomor Induk : E061181337  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan bahwa karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Strategi Non-Governmental Organization (NGO) dalam Mendukung Pencapaian SDGs Tujuan 5 di Indonesia: (Studi Kasus: Women Research Institute)”**

Adalah benar merupakan karya ilmiah saya sendiri dan tidak diambil alih dari karya tulisan orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat, jika pada kemudian hari ditemukan bukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, kecuali kutipan yang telah saya cantumkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2023



Hanuun Haniifah Tauhid

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'amin*, pujian dan ungkapan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Salam dan shalawat kepada Rasulullah SAW sebagai ungkapan syukur telah diperkenankan menjadi pengikutnya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi selama melaksanakan studi dan penyelesaian skripsi. Ucapan terima kasih dalam tulisan ini tidak dapat menggambarkan betapa besar apresiasi yang ingin penulis sampaikan. Semoga kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada penulis dapat kembali dalam bentuk yang lebih baik.

1. Orang tua penulis, Dr. Mohammad Tauhid Soleman, M.Si dan Marliza Marsaoly S. Farm yang tidak henti-hentinya mendoakan penulis, memberikan dorongan, *brain storming*, dan bimbingan skripsi dadakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik, keluarga, dan tim Kediaman Jan yang selalu menghibur dan memberikan dukungan kepada penulis.
3. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Phil. Sukri, M. Si., beserta jajarannya.

4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak H. Darwis, MA, Ph.D dan Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak Aswin Baharuddin, S.IP., MA.
5. Pembimbing skripsi, Ibu Seniwati, S. Sos., M. Hum., Ph.D dan Ibu Pusparida Syahdan, S. Sos., M. Si. atas bimbingan, masukan, dan ilmu yang diberikan selama proses pengerjaan skripsi.
6. Jajaran dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional atas ilmu yang diberikan selama ini. Pak Patrice, Pak Imran, Pak Adi, Pak Husain, Pak Munjin, Pak Nasir, Pak Bur, Pak Agus, Pak Ishaq, , Kak Gego, Kak Jannah, Kak Bama, Kak Aca, serta Alm. Pak Aspiannor. Tidak lupa staf akademik Ibu Rahma, Pak Ridho, dan Pak Dayat, yang selalu cekatan dan sabar selama proses pengurusan dokumen berlangsung.
7. Tim WRI yaitu Ibu Sita, Ibu Nana, Mbak Nita dan Tante Hetty, Dosen Poltekkes Jakarta III, terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam skripsi ini.
8. Reforma 2018, terima kasih atas pengalamannya.
9. Para guru yang majelis onlinenya penulis hadiri lewat YouTube, Instagram, dan Twitter, terima kasih atas bimbingan spiritual sehingga penulis tetap semangat melewati tantangan penulisan skripsi. Kepada Ustadzah Halimah Alaydrus, Ummu Salim bin Jindan, Habib Novel Alaydrus, dan Buya Arrazy Hasyim, serta Nuralwala, terima kasih atas ilmu gratisnya. Tidak lupa Habib Zen @KitabHikam dengan pembahasan kalam Ibn Atha'illah dan pemikiran Al-Ghazali lewat Twitter Space yang selalu menyadarkan penulis untuk lebih

banyak melihat ke dalam diri. Tidak lupa, khususnya, Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas yang sudah memberikan banyak ilmu selama ini, semoga selalu dilimpahkan kesehatan.

10. Member Tadika/Hanibaniswiti/Self Love, semoga kita bisa terus berkembang dan bertumbuh bersama.
11. Spesial untuk Astrid, Lute, Nanda, Nabilah, Suci, dan Dellya, meskipun ucapan terima kasih saja tidak cukup.
12. Putri Fitria, teman sejak TK yang selalu ada di setiap kesempatan. Semoga setelah ini bisa menempuh S2 sesuai passion.
13. Terakhir, semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, termasuk para penstudi Hubungan Internasional yang penulis baca artikel ilmiahnya selama ini.

Skripsi ini hanyalah karya kecil dari penulis yang masih mendalami ilmu hubungan internasional sehingga terdapat banyak kekurangan dalam substansinya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat tidak hanya untuk penulis tetapi juga para pembaca.

Makassar, Janurari 2023

Hanuun Haniifah Tauhid

## ABSTRAK

Pembangunan dan gender memiliki keterkaitan satu sama lain. Tujuan pembangunan global yang diadopsi melalui Sustainable Development Goals salah satunya melalui Tujuan 5 Kesetaraan Gender. Tujuan ini merupakan upaya untuk menghadapi ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat. Perwujudan kesetaraan gender diperlukan pemberdayaan perempuan sehingga perempuan dapat berdaya dan mampu mengupayakan hak-haknya. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan oleh Non-Governmental Organization yang dalam penelitian ini menggunakan Women Research Institute sebagai subjek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh WRI dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Konsep yang digunakan adalah NGO, pemberdayaan perempuan, dan SDGs. Konsep NGO digunakan untuk melihat peran serta fungsi yang dibawa oleh WRI. Untuk melihat metode pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh WRI digunakan konsep pemberdayaan perempuan. Adapun penggunaan konsep SDGs adalah untuk melihat tujuan SDGs yang relevan dengan program yang dilakukan oleh WRI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Penggunaan tiga konsep tersebut menghasilkan temuan penelitian terkait peluang dan tantangan yang dihadapi WRI. Secara umum, WRI dan Indonesia dalam upaya kesetaraan gender memiliki kesamaan visi dan misi sehingga terjadi interaksi kooperatif. Dalam membantu Indonesia untuk menyelenggarakan Tujuan 5 SDGs, WRI memiliki peluang dalam upaya kesetaraan gender karena isu gender merupakan isu yang multidimensional sehingga WRI dapat melakukan upaya pemberdayaan perempuan pada berbagai isu dalam masyarakat. Fleksibilitas isu gender ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh WRI melalui skema kerja sama *multi-stakeholder* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Isu kesetaraan gender di Indonesia yang menjadi fokus WRI adalah mengadvokasi perempuan untuk terlibat secara aktif secara umum dalam partisipasi politik dan secara khusus memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berdaya dan mengupayakan haknya. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh WRI adalah sistem patriarki yang mengakar dalam kehidupan masyarakat menyebabkan WRI perlu bekerja ekstra untuk melakukan advokasi tidak hanya untuk masyarakat melainkan juga pemerintah. Meskipun keterbatasan dana dan waktu yang dimiliki oleh WRI dalam penyelenggaraan kesetaraan gender masih menjadi tantangan untuk terus mempertahankan keberlanjutan program, WRI tetap berupaya untuk menumbuhkan semangat kesetaraan gender khususnya pada perempuan melalui berbagai program pemberdayaannya.

**Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender, SDGs, WRI**

## **ABSTRACT**

Development and gender are related to one another. One of the global development goals is gender equality, adopted by the Sustainable Development Goals through Goal 5. This goal is an effort to deal with gender inequality that occurs in society. Women's empowerment is needed to achieve gender equality. Thus, they can be empowered and able to strive for their rights. Non-Governmental Organizations can carry out women's empowerment, and in this study, Women Research Institute is used as the research subject. This research aims to identify the opportunities and challenges faced by WRI to actualize gender equality in Indonesia. This research use NGOs, women's empowerment, and SDGs as the concepts. The NGO is used to see the roles and functions carried out by WRI. The idea of women's empowerment is used to know the method of empowering women carried out by WRI. The use of the SDGs is to see SDGs objectives relevant to the programs carried out by WRI. This research uses qualitative methods by collecting data through interviews and library research. These three concepts find that, in general, WRI and Indonesia, in their gender equality efforts, have the same vision and mission that can be seen as cooperative interactions. In assisting Indonesia in implementing SDGs Goal 5, WRI has the opportunity to work on gender equality because gender is a multidimensional issue, and they can empower women to share the problems in society. This flexibility of gender issues can be utilized through a multi-stakeholder cooperation scheme that involves various stakeholders. The point of gender equality in Indonesia, which became the focus of WRI, is advocating for women to be actively engaged in political participation and, in particular, providing opportunities for women to be empowered and fight for their rights. The biggest challenge faced by WRI is the patriarchal system that is rooted in society, causing WRI to work extra hard to advocate not only for the community but also for the government. Even though WRI has limited funds and time to implement gender equality and it is still challenging to maintain a sustainable program, WRI strives to foster the spirit of gender equality, especially for women, through its various empowerment programs.

**Keywords: Women Empowerment, Gender Equality, SDGs, WRI**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
D. Kerangka Konseptual.....	14
1. Non-Governmental Organization .....	15
2. Pemberdayaan Perempuan.....	17
3. Sustainable Development Goals .....	21
E. Metode Penelitian .....	22
1. Tipe Penelitian .....	22
2. Jenis Data.....	22
3. Pengumpulan Data.....	23
4. Analisis Data.....	23
F. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II KERANGKA KONSEP .....</b>	<b>26</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	26
B. Non-Governmental Organization .....	29
C. Pemberdayaan Perempuan.....	32
D. Sustainable Development Goals .....	37
<b>BAB III NGO DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA</b> <b>.....</b>	<b>42</b>
A. Kondisi Perempuan di Indonesia .....	42
B. Upaya Peningkatan Kesetaraan Gender di Indonesia .....	51

1. Pemerintah Indonesia Melalui Bappenas.....	51
2. Pemerintah Indonesia Melalui Kementerian PPPA.....	63
3. Pemberdayaan Perempuan oleh NGO .....	65

#### **BAB IV STRATEGI WRI DALAM MENDUKUNG**

#### **PENCAPAIAN SDGs TUJUAN 5..... 76**

A. Peluang WRI dalam Mewujudkan Pencapaian SDGs Tujuan 5.....	76
B. Tantangan WRI dalam Mewujudkan Pencapaian SDGs Tujuan 5.....	95

#### **BAB V PENUTUP ..... 102**

A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103

#### **LAMPIRAN ..... 114**

A. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	114
B. Surat Izin Penelitian.....	115
C. Data-Data WRI .....	116

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Proporsi Jabatan Manajer.....50  
Gambar 2 Proporsi Perempuan sebagai Pemimpin Daerah Tahun 2020.....51  
Gambar 3 Implementasi Kesetaraan Gender dalam RPJMN 2020-2024 .....60

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Proporsi Perempuan dalam Lembaga Legislatif.....50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Modernisasi pembangunan tidak hanya mengubah model pembangunan semata, tetapi juga berdampak pada masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang terdampak adalah kelompok perempuan dan anak. Dampak ini mengakibatkan ketimpangan gender yang harus diperhatikan. Adanya kelompok yang harus mengemban beban dari pembangunan menunjukkan bahwa diperlukan suatu kerangka yang dapat digunakan untuk mengatur pembangunan yang belum terstruktur dengan baik. Melalui mekanisme ini, diharapkan dapat tercipta kondisi yang perlahan-lahan dapat membawa dampak positif yang signifikan dan masif terhadap kelompok-kelompok yang tadinya hanya merasakan dampak negatif dari pembangunan tersebut.

Gender merupakan fenomena kompleks (Colineaux et al., 2022). Gender tidak hanya berbicara mengenai feminitas atau maskulinitas semata. Sebagai sebuah fenomena, gender memiliki lapisan struktur yang bersifat multidimensi, kontekstual, berkembang lintas generasi dan menyebar dalam berbagai lapisan masyarakat. Konsepsi terhadap gender dilakukan secara sosial melalui tekanan normatif sistematis dan diamati sebagai sebuah kesenjangan distribusi pada level populasi.

Sebagai sebuah konstruksi sosial, gender dipersepsikan secara berbeda kepada individu sesuai dengan jenis kelaminnya saat lahir. Media populer juga turut serta memainkan peranan yang besar dalam membentuk persepsi terhadap gender (Fivush & Gryzman, 2022). Penggambaran laki-laki dan perempuan dengan ciri tertentu dan bertumpu pada konsep gender yang biner menciptakan pemahaman tidak seimbang terhadap perempuan dan laki-laki.

Persepsi gender yang disematkan kepada individu kemudian membentuk ketidaksetaraan gender. Penggambaran perempuan sebagai individu tidak rasional dan lemah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Dalam konteks ini, ketidaksetaraan gender umum dialami oleh perempuan. Sebagai bagian dari sistem stratifikasi, gender menciptakan status sosial yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan (Lorber, 2018). Dengan demikian, persepsi gender berimplikasi pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Permasalahan ketimpangan gender seperti perempuan yang mengalami kendala untuk mengakses lapangan pekerjaan, upah yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak dilibatkannya perempuan dalam proses pengambilan kebijakan, serta kebebasan dan hak fundamental lainnya yang tergerus oleh pola pembangunan yang ada dapat digunakan untuk mulai melihat bagaimana ketimpangan-ketimpangan yang terjadi khususnya yang dialami oleh perempuan. Meskipun permasalahan ketimpangan gender yang sebagian besar dialami oleh perempuan terlihat lebih banyak terjadi pada aspek ekonomi, hal

ini tentu tidak dapat dijadikan pembenaran bahwa permasalahan ketimpangan gender hanya terjadi pada satu aspek saja. Pemahaman bahwa persoalan gender tidak hanya pada persoalan tentang bagaimana perempuan mengalami ketidakadilan atas hak-hak yang seharusnya diperoleh, tetapi juga berusaha untuk melihat bagaimana konstruksi gender yang selama ini telah menciptakan perbedaan-perbedaan dalam struktur sosial masyarakat dan umumnya secara sepihak menciptakan ketidakadilan pada perempuan dalam masyarakat.

Salah satu ketidaksetaraan gender dapat diamati melalui minimnya partisipasi perempuan di bidang politik yang tidak terlepas dari persepsi peran gender. Gagasan tentang tanggung jawab perempuan pada ranah domestik menciptakan kesenjangan bagi perempuan untuk ikut aktif secara politis (Grasso & Smith, 2022). Kesenjangan terhadap keterlibatan perempuan di bidang politik pada akhirnya menciptakan rendahnya representasi perempuan. Representasi yang rendah berdampak pada ketidakberhasilan dalam menerjemahkan kepentingan perempuan. Penerjemahan kepentingan perempuan ini sudah selayaknya dapat diakomodasi melalui proses politik pengambilan kebijakan.

Kehadiran Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan ketimpangan gender yang terjadi akibat pola pembangunan yang telah terjadi (Ergül & Soytaş, 2019). Kegagalan Millenium Development Goals (MDGs) dalam mengembangkan kesetaraan gender sebagai sebuah konsep yang bersifat interseksional berubah melalui kehadiran SDGs. Langkah ini memberikan dimensi yang lebih luas secara khusus bagi

upaya kesetaraan gender dalam setiap interseksi dengan enam belas tujuan lainnya. Tidak hanya berusaha mengentaskan permasalahan vital seperti kemiskinan dan kesejahteraan, SDGs melalui tujuan lima juga memberikan kesempatan pada perempuan untuk berdaya secara sosial dan berpengaruh dalam bidang politik (Goetz, 2020).

Ashford dan Izugbara berpendapat tentang bagaimana idealnya konsep pemberdayaan terhadap perempuan dalam bentuk yang berkelanjutan (Phillips, 2015). Keduanya menitikberatkan pada kebutuhan pemberdayaan yang tidak hanya difokuskan pada aspek ekonomi semata, tetapi diperlukan juga keinginan yang kuat untuk memberdayakan perempuan dalam aspek perimbangan kekuatan dan keberpihakan untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat secara holistik dalam proses pembuatan kebijakan. Pendapat ini juga didukung dengan konsep multidimensi dari pemberdayaan perempuan (Galiè & Farnworth, 2019). Pemberdayaan perempuan idealnya mencakup dimensi, institusi, dan masyarakat yang luas sehingga pemberdayaan dapat memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menentukan hidupnya sendiri.

SDGs sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan berupaya untuk menciptakan skema pembangunan yang tidak hanya menguntungkan generasi yang ada saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Melalui kesadaran ini, SDGs kemudian termanifestasi ke dalam tujuh belas tujuan pembangunan di mana yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah tujuan nomor lima, yaitu kesetaraan gender. Tujuan kesetaraan gender yang dibawa melalui visi *achieve*

*gender equality and empower all women* menjadi dasar untuk mengentaskan diskriminasi, memberdayakan perempuan, dan mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki (UN Women, 2022). Dengan pendekatan gender dalam pembangunan, maka pemberdayaan khususnya pada perempuan juga dapat dilihat sebagai upaya menumbuhkan ekonomi dan mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan.

SDGs sebagai kerangka untuk mencapai kesetaraan gender tidak cukup untuk mengidentifikasi bagaimana SDGs dapat diaplikasikan secara langsung kepada masyarakat. Dibutuhkan peranan aktor untuk melihat aplikasi SDGs secara vertikal. Upaya mencapai kesetaraan gender dapat dilakukan oleh siapa saja. Salah satu aktor yang berperan signifikan adalah *Non-Governmental Organization* (NGO). *Women Research Institute* (WRI) Indonesia merupakan salah satu NGO yang ada di Indonesia dan bergerak pada upaya pencapaian kesetaraan gender. WRI merupakan NGO yang fokus pada penelitian dengan menggunakan metodologi dan analisis feminis (WRI, 2022c). WRI melalui penelitiannya berupaya untuk menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang adil dan setara dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

WRI memiliki program-program yang dikhususkan pada pemberdayaan perempuan utamanya di sektor sosial dan politik. Sektor politik dan pemberdayaan politik khususnya dalam upaya mencapai kesetaraan gender merupakan aktivitas yang esensial menurut penulis, mengingat bagaimana bidang politik dan kebijakan publik memiliki relevansi satu sama lain. Melalui proses pembuatan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan-tantangan yang

dihadapi dalam upaya pengarusutamaan gender, dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

WRI didirikan dengan memperhatikan kondisi-kondisi ketimpangan yang dialami oleh perempuan (WRI, 2022c) . Ada tiga kondisi yang mendasari pembentukan WRI, yaitu sempitnya akses perempuan terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan; rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan; serta rendahnya kapasitas wakil perempuan dalam memengaruhi kebijakan baik formal maupun informal. Berangkat dari permasalahan tersebut, WRI berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan menghargai kepemimpinan perempuan serta mengakui peran perempuan dalam mempromosikan tata kelola sumber daya alam sehingga menjadi lebih inklusif, berbasis gender, dan berkelanjutan.

Penelitian berbasis pendekatan feminis merupakan bidang yang ditempuh oleh WRI untuk memperjuangkan kesadaran kritis perempuan dan laki-laki mengenai pentingnya persoalan privat dan persoalan publik (WRI, 2022c). Upaya peningkatan kualitas pengambilan keputusan juga dilakukan melalui penguatan akses, jumlah, serta kapasitas perempuan dalam partisipasi pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh WRI diharapkan dapat menjadi dasar perubahan wacana serta perilaku dan pembuatan kebijakan yang setara bagi perempuan dan laki-laki yang semuanya dilakukan dengan pendekatan metodologi feminis.

Mengkaji WRI dan program kesetaraan gender yang dilakukan dapat dikaji melalui pendekatan *Non-Governmental Organizations*. Dapat diidentifikasi bahwa peranan institusi negara merupakan salah satu yang berperan untuk mencapai kesetaraan gender, namun, institusi negara bukanlah satu-satunya pihak yang dapat menciptakan kesetaraan gender. Ada peranan dari pihak lain yang juga esensial. Pengarusutamaan gender dapat dilakukan melalui skema *multi-stakeholder* (Stibbe & Prescott, 2020). Skema ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan berbagai aktor dalam upaya mencapai kesetaraan gender baik dalam aspek implementasi maupun pengawasan, yang dalam hal ini juga mencakup peranan NGO.

Peranan NGO dalam kesetaraan gender penting khususnya dalam diseminasi gagasan. Konsep yang dikenal dengan istilah *travel* juga mengemukakan bahwa proyek-proyek yang membawa gagasan kesetaraan gender membantu menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif (Adolfsson & Madsen, 2020; Woodward, 2015). Pemahaman yang baik ini tidak hanya berputar pada kelompok penggagas, tetapi juga berpindah pada kelompok epistemik dan pembuat kebijakan. Berangkat dari kondisi ini, penggunaan NGO untuk diseminasi ide dengan harapan akan terbangun pemahaman yang baik oleh pembuat kebijakan dalam mengarusutamakan kesetaraan gender dapat terwujud. Penjelasan ini juga didukung dengan pemahaman bahwa NGO meskipun dalam beberapa kondisi dianggap sebagai rintangan bagi pemerintah, namun di sisi lain juga dapat berfungsi sebagai *partner* dari pemerintah (Ismail & Kamat, 2018). Dengan memanfaatkan relasi

ini, NGO dapat bertindak sebagai oposisi terhadap kebijakan yang tidak terbuka terhadap kesetaraan gender namun juga dapat menjadi sumber yang baik bagi pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan dengan menggunakan konsep *idea travel* dalam mewujudkan kebijakan publik yang mengedepankan kesetaraan gender.

Kesetaraan gender merupakan perwujudan terhadap pengentasan ketidaksetaraan gender. Kesetaraan gender bertumpu pada interseksionalitas (Gupta et al., 2019). Aspek sosial merupakan aspek yang cukup esensial dalam menggambarkan kesetaraan gender. Banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan perwujudan kesetaraan gender mengingatkan bahwa kesetaraan gender tidak dapat diproyeksikan sebagai kondisi satu dimensi saja. Kesetaraan gender merupakan kondisi yang multidimensi yang mana perwujudannya tidak dapat dibebankan hanya pada satu aspek saja.

Pemahaman terhadap kesetaraan mengedepankan tidak diabaikannya kebebasan dan peluang yang setara (Breton & Perez, 2021). Kesetaraan bukan berarti memberikan sesuatu dalam bentuk dan proporsi yang sama persis antara satu dan lainnya. Kesetaraan berupaya untuk memberikan kebebasan dan peluang yang adil serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dalam konteks kesetaraan gender, kesetaraan tidak dilihat sebagai pemberian hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki, melainkan pemberian hak secara proporsional baik kepada perempuan maupun laki-laki untuk menciptakan kesetaraan antara satu dengan lainnya. Pada pembahasan kesetaraan gender, sebagian besar menyepakati definisi kesetaraan gender sebagai kondisi yang sama, dan

menitikberatkan pada perlakuan dan kesempatan yang ditujukan kepada kelompok-kelompok untuk mewujudkan potensinya. Melalui perlakuan dan akses kesempatan, diharapkan kesetaraan gender dapat menempatkan target aktornya dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Meskipun pemahaman terhadap kesetaraan gender digambarkan sebagai aspek yang saling bersinggungan satu sama lain, penelitian ini hanya akan membahas kesetaraan gender pada bidang politik. Bidang politik merupakan dimensi yang esensial mengingat salah satu luarannya adalah kebijakan. Kesetaraan gender sepatutnya tidak hanya berada pada tataran administratif seperti jumlah keterwakilan jumlah partisipasi perempuan dalam bidang politik semata. Kedalaman dan kualitas partisipasi serta produk yang dihasilkan melalui partisipasi politik khususnya oleh perempuan idealnya dapat menjadi fokus utama.

Kesetaraan gender sebagai antitesis dari ketimpangan gender berkaitan erat dengan pemberdayaan perempuan dan diberikannya akses-akses pengembangan diri. Meskipun permasalahan ketimpangan gender yang sebagian besar dialami oleh perempuan terlihat lebih banyak terjadi pada aspek ekonomi, hal ini tentu tidak dapat dijadikan pembenaran bahwa permasalahan ketimpangan gender hanya terjadi pada satu aspek saja.

Kampanye pengentasan ketidaksetaraan, kemunculan lembaga, organisasi, komunitas, dan berbagai institusi dengan misi menciptakan kesetaraan gender nyatanya tidak serta merta menghilangkan ketidaksetaraan yang terjadi, baik secara global, maupun secara khusus pada tingkat negara dan

secara vertikal ke bawah. Ketidaksetaraan gender dalam berbagai bentuk masih dapat ditemui, misalnya diskriminasi pada kelompok marginal, kesulitan akses untuk memenuhi kebutuhan dasar, kurangnya representasi pada aspek politik dan pembuatan kebijakan merupakan sedikit contoh dari banyaknya ketidaksetaraan gender yang terus terjadi.

Tujuan kesetaraan gender merupakan tujuan yang dapat dikatakan ambisius, namun pada kenyataannya belum ada negara yang berhasil secara holistik mencapai tujuan ini (Chaverri et al., 2020). Ketidakmampuan ini disebabkan oleh banyak faktor, namun yang perlu digarisbawahi adalah permasalahan gender merupakan permasalahan yang kompleks. Kesetaraan gender direduksi sebagai permasalahan upah yang tidak setara atau kekerasan seksual, namun nyatanya, banyak aspek sosial yang harus diperhatikan dalam membahas kesetaraan gender. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan tujuan yang sebenarnya harus dimaknai dalam banyak dimensi kehidupan sosial.

Aspek yang saling bersinggungan bukan berarti membuat kesetaraan gender sulit untuk dideskripsikan. Namun demikian, dalam tulisan ini, aspek pembuatan kebijakan yang akan dibahas. Pembuatan kebijakan yang lebih ramah dan terbuka terhadap kesetaraan gender dapat mendorong percepatan upaya kesetaraan gender melalui regulasi dan kebijakan yang secara hukum bersifat lebih kuat. Urgensi kesetaraan gender menjadi esensial dengan mempertimbangkan bagaimana selama ini ketimpangan partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan masih dapat ditemui. Melalui model

pembuatan kebijakan yang terbuka pada kesetaraan gender, atau sekurang-kurangnya proses pemberdayaan perempuan di bidang politik diharapkan dapat berdampak pada kebijakan yang dapat menjadi payung bagi kelompok masyarakat yang selama ini masih berhadapan dengan ketimpangan gender.

Keterlibatan kesetaraan gender merupakan salah satu aspek penting di mana banyak kebutuhan gender yang tidak diterjemahkan dengan baik dalam perumusan kebijakan. Banyak kebijakan yang telah berupaya untuk mengatasi permasalahan ketidaksetaraan, namun kebijakan ini hanya berada pada level nasional dan tidak diaplikasikan dengan baik pada kebijakan-kebijakan struktural di level lokal (Chaverri et al., 2020). Relevansi kesetaraan gender dalam pembuatan kebijakan tidak berada pada tataran kuantitas kebijakan yang dibuat, namun pada tataran kualitas terintegrasinya kesetaraan gender dalam pembuatan kebijakan.

Hadirnya WRI dalam mewujudkan kesetaraan gender dilakukan dalam banyak bentuk. Aktivitas WRI di bidang politik khususnya yang dapat diidentifikasi adalah melalui proyek analisis partisipasi perempuan dan *gender budget*. Dengan memanfaatkan situs resmi WRI, selain memberikan analisis terhadap persoalan kesetaraan gender, WRI juga fokus pada *capacity building* dalam bentuk pelatihan, pendampingan, *workshop*, serta kunjungan belajar. Melalui *capacity building*, target dari kesetaraan gender ini tidak hanya menasar pada pemberdayaan perempuan, tetapi juga wadah bagi WRI untuk memperoleh informasi relevan terhadap perwujudan kesetaraan gender.

Informasi inilah yang kemudian akan didiseminasikan kepada target-target relevan untuk bersama-sama mengupayakan kesetaraan gender.

WRI menawarkan pendekatan feminis dalam metodologi penelitian untuk memberikan gambaran yang mendalam terhadap kondisi ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan. Penelitian berbasis pendekatan feminis memberikan kesempatan terbukanya akses informasi mengenai permasalahan yang secara spesifik dialami oleh perempuan sebagai hasil dari ketidaksetaraan gender. Melalui metodologi riset feminis, WRI berupaya menyajikan hasil penelitian yang mengedepankan aspek keberagaman dalam lapisan masyarakat untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan gender.

Sebagai sebuah NGO yang bergerak di bidang penelitian, WRI telah menerbitkan berbagai publikasi yang relevan untuk menjadi acuan tentang gambaran ketidaksetaraan gender yang terjadi di Indonesia. Publikasi hasil riset WRI hadir dalam beragam bentuk, beberapa di antaranya adalah lembar fakta, rekomendasi kebijakan, serta pelatihan kepemimpinan yang dapat diakses melalui laman resmi (WRI, 2022b) dan media sosial WRI (WRI, 2022a). Tidak hanya melalui publikasi fisik hasil riset, upaya kesetaraan gender juga dibawa oleh WRI melalui keterlibatan aktif sebagai pembicara dalam forum-forum kesetaraan gender termasuk dalam *engagement group* Women 20 sejak 2018 (WRI, 2021).

Sebagai lembaga riset yang berbentuk NGO, sumber daya finansial didapatkan melalui bantuan dana dari sponsor. WRI dalam beberapa proyek penelitian didanai dan difasilitasi oleh lembaga di luar negeri. Beberapa

lembaga yang pernah menjalin kerja sama dengan WRI yaitu Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking/Humanist Institute for Development Cooperation, United States Agency for International Development (USAID), dan Millenium Challenge Corporation USA.

Meskipun sebagai sebuah NGO WRI telah melakukan banyak aktivitas yang relevan terhadap upaya kesetaraan gender, jumlah penelitian yang membahas WRI masih sedikit bahkan tidak ada. Hal ini pula yang mendasari peneliti untuk menjadikan WRI sebagai objek penelitian. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk menjawab dua pertanyaan utama yaitu, bagaimana WRI melalui berbagai program yang telah dilaksanakan dalam perwujudan kesetaraan gender di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai bagian dari pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan Kesetaraan Gender serta bagaimana WRI berperan dalam mewujudkan kesetaraan gender pada aspek sosial dan politik.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan menggunakan aspek politik yaitu keterlibatan dalam pembuatan kebijakan dan pemberdayaan perempuan di bidang politik untuk membatasi cakupan permasalahan yang akan diteliti dengan dua pertanyaan penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana peluang NGO dalam mewujudkan pencapaian SDGs Tujuan 5?
- b. Bagaimana tantangan NGO dalam mewujudkan pencapaian SDGs Tujuan 5?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis peluang Women Research Institute dalam perwujudan Tujuan Kesetaraan Gender di Indonesia
2. Mengidentifikasi dan menganalisis peranan WRI dalam perwujudan Tujuan Kesetaraan Gender di Indonesia.

Dari uraian tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai:

1. Salah satu bentuk sumbangsih terhadap kajian ilmu hubungan internasional dan secara spesifik dapat memberikan pembaruan dalam kajian gender dan pemberdayaan perempuan dalam studi hubungan internasional;
2. Salah satu referensi bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang relevan untuk melihat peranan NGO yang dapat diintegrasikan gagasannya dalam perumusan kebijakan; serta
3. Salah satu referensi bagi NGO sebagai aktor dalam hubungan internasional untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam pengarusutamaan kesetaraan gender.

### **D. Kerangka Konseptual**

Penggunaan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah untuk menjadi landasan pemikiran dalam melaksanakan penelitian. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *Non-Governmental Organization* (NGO), pemberdayaan perempuan dan *Sustainable Development Goals*.

## 1. Non-Governmental Organization

NGO memiliki peranan yang penting dalam diseminasi informasi kesetaraan gender. NGO dapat menjalankan peranannya untuk mengadvokasi kesetaraan gender, tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk institusi pemerintah maupun sektor privat serta dapat menginisiasi kerja sama yang luas dengan aktor-aktor lain (Adolfsson & Madsen, 2020; Broś, 2017; Hege & Demailly, 2017; Kabir et al., 2018; Kumaran, 2014; Tortajada, 2016). Upaya NGO dalam meningkatkan kualitas hidup komunitas yang diwakilinya dalam hal ini menunjukkan bagaimana sebuah institusi sosial berpengaruh terhadap pengentasan ketimpangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Pada aspek pembuatan kebijakan, NGO juga berperan dalam memberikan pemahaman yang lebih baik karena kedekatannya dengan isu yang sedang dibahas. Tidak hanya itu, kemampuan NGO dalam mengomunikasikan SDG kepada publik juga dapat memudahkan proses diseminasi kesetaraan gender.

NGO dapat bertindak sebagai *norm entrepreneurs* yang secara partikular dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap negara (Stroup, 2019). Peranan ini penting karena negara merupakan salah satu aktor yang kebijakannya memiliki kekuatan hukum dan dapat menjadi payung perlindungan oleh individu atau kelompok, khususnya yang termarginalkan untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya diperoleh. NGO dalam proses perlindungan dan promosi kepentingan kelompok marginal yang diwakilinya, juga dapat dilihat sebagai salah satu bentuk masyarakat sipil

yang sehat (Atia & Herrold, 2018). Promosi dan perlindungan kepentingan oleh NGO salah satunya dilakukan melalui fungsi pengawasan. Hal ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara dapat diimbangi dengan pengawasan oleh NGO sehingga kebijakan tersebut tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan lebih banyak pihak lain.

Dalam hubungan internasional, kajian terhadap hubungan NGO dengan negara merupakan salah satu diskursus yang umum ditemui. Interaksi antara NGO dan negara penting untuk dipahami karena interaksi keduanya dapat memengaruhi bagaimana NGO bertindak. Interaksi antara NGO dan negara terdiri atas empat interaksi, yaitu kerja sama, kooperasi, kooptasi, kompetisi, dan konflik (Stroup, 2019). Melalui interaksi ini, pola-pola aktivitas yang dilakukan oleh NGO dan negara dapat terlihat. Interaksi ini menunjukkan bahwa NGO dan negara saling memengaruhi satu sama lain. Pola-pola interaksi pada akhirnya turut berkontribusi pada model-model pengambilan kebijakan.

Interaksi dalam bentuk kooperasi, kooptasi, kompetisi, dan konflik dapat dipahami dengan melihat antara tujuan dan strategi yang diaplikasikan baik oleh NGO maupun negara. NGO dan negara dapat memiliki persamaan baik tujuan maupun strategi. Ketika NGO dan negara memiliki persamaan tujuan dan strategi, maka interaksi keduanya membentuk pola hubungan kooperatif. Di sisi lain, ketika NGO dan negara memiliki persamaan tujuan namun berbeda dalam hal strategi, maka interaksi keduanya dapat

membentuk pola hubungan kompetitif. Selain persamaan, NGO dan negara juga dapat memiliki perbedaan tujuan. Ketika tujuan NGO dan negara berbeda namun sama dalam hal strategi, maka pola hubungan yang terbentuk adalah interaksi kooptatif. Di sisi lain ketika NGO dan negara memiliki tujuan dan strategi yang berbeda, maka pola hubungan yang terbentuk adalah interaksi yang mengarah pada konflik.

## 2. Pemberdayaan Perempuan

Konsep pemberdayaan dalam upaya perwujudan kesetaraan gender merupakan salah satu aktivitas esensial. Pemberdayaan ditujukan untuk mencapai tingkatan kemampuan tertentu yang mana melalui kemampuan ini target pemberdayaan dapat memperoleh hak-haknya. Berdasarkan konsep pemberdayaan yang dibawa oleh Baccaro, pemberdayaan didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mencapai kontrol baik sosial, politik, ekonomi, dan psikologi (Nikkhah & Redzuan, 2010). Pendefinisian pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kontrol kepada individu menunjukkan bagaimana konsep pemberdayaan secara khusus ditujukan untuk menciptakan pengembangan diri. Melalui pengembangan diri, individu diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan, tidak hanya dalam pembangunan fisik tetapi juga sosial.

Pemberdayaan menurut O'Brien & Whitmore didefinisikan sebagai proses interaktif yang menempatkan individu yang kurang kuat (*less powerful*) pada kesempatan untuk mengalami perubahan baik pribadi maupun sosial dengan harapan melalui perubahan ini individu akan

memiliki pengaruh atas institusi atau lembaga yang berpengaruh dalam kehidupannya. Pendapat mengenai perubahan pola hubungan kekuasaan ini juga dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak otonomi dalam pengambilan keputusan oleh perempuan (Sharma, 2020a; Syed, 2010; van der Waldt et al., 2019). Kedua definisi ini memberikan kesempatan bagi perempuan melalui pemberdayaan untuk mendapatkan otonomi dan memiliki pengaruh terhadap institusi dalam pengambilan kebijakan. Penggunaan istilah pengaruh dalam definisi ini sejalan dengan pendapat Baccaro di atas mengenai kontrol. Konsep kontrol yang sama juga sejalan dengan tujuan dilaksanakannya peningkatan kapasitas yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan (Dar, 2020). Kontrol individu terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan memberikan kesempatan kepada individu untuk berpengaruh pada lembaga-lembaga yang relevan dengan kehidupan individu. Pengaruh dari kontrol yang didapatkan melalui pemberdayaan memberikan akses bagi partisipasi, kepemimpinan, dan perubahan yang transformatif.

Pemberdayaan perempuan merupakan pemberdayaan yang dilakukan kepada perempuan dengan melihat kondisi seperti yang didefinisikan sebagai individu *less powerful* memberikan kesempatan kepada perempuan yang menjadi bagian dari kelompok marginal untuk memberdayakan dirinya. Meskipun telah digunakan dua definisi di atas, tidak ada definisi yang paten digunakan untuk mendefinisikan pemberdayaan karena berbagai perbedaan konteks sosial. Namun demikian,

sebagian besar studi menggunakan definisi pemberdayaan perempuan untuk menggambarkan peningkatan politik, sosial, edukasi, ekonomi, dan komunitas perempuan (al Khayyal et al., 2021). Ketiga definisi ini cukup untuk menggambarkan bagaimana pemberdayaan perempuan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk melakukan pengembangan diri yang diharapkan akan berdampak positif kehidupannya. Pemberdayaan didesain untuk membuka akses bagi perempuan untuk menentukan pilihannya serta memiliki kontrol atas kesempatan, sumber daya, dan pilihan individual yang nantinya akan berdampak terhadap kehidupan serta secara holistik mengubah kehidupan sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan.

Pemberdayaan erat kaitannya dengan partisipasi. Baik pemberdayaan secara umum maupun pemberdayaan perempuan secara khusus, partisipasi dapat membuka kesempatan bagi pemenuhan hak-hak individual dengan lebih baik karena target pemberdayaan turut andil dalam proses tersebut. Partisipasi memungkinkan terbukanya akses informasi yang lebih mendalam dengan pelibatan aktor yang secara langsung terdampak. Melalui partisipasi, kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat terakomodasi diharapkan dapat diakomodasi dengan maksimal.

Meskipun partisipasi dimaknai sebagai metode yang ideal untuk menjalankan pemberdayaan, partisipasi tidak menjamin dapat menciptakan pemberdayaan yang baik. Permasalahan ini lebih akrab dikenal dengan

istilah tokenisme (Kamruzzaman, 2020). Partisipasi yang tokenistik dengan mendasarkan permasalahan bukan pada substansi yang ingin dicapai melalui partisipasi aktor. Partisipasi aktor yang dalam konteks ini adalah perempuan tidak ditempatkan sebagai peluang untuk mendapatkan informasi holistik terkait permasalahan yang dihadapi dan menjadi media untuk mencapai solusi. Partisipasi dilihat sebagai pemanfaatan dari kecenderungan politik dan keinginan untuk memenuhi unsur kuantitas partisipasi. Melalui pandangan politik dan kuota keterwakilan, partisipasi perempuan dimaknai sebagai kebutuhan untuk memenuhi persyaratan dan tidak dimaknai sebagai bentuk penguatan komunitas masyarakat melalui keterwakilan perempuan.

Selain fokus pada partisipasi, berbagai metode pemberdayaan lainnya juga perlu dilihat kembali. Pemberdayaan hanya dapat terwujud dengan optimal ketika banyak pihak berkolaborasi dan tidak membebankan tugas pemberdayaan kepada satu aktor, satu level, dan satu dimensi secara spesifik. Pemberdayaan idealnya bersifat multilevel dan multidimensi (Alexander & Jalalzai, 2020; Dongre, 2022; Galiè & Farnworth, 2019). Kedua pendekatan ini penting mengingat berbagai permasalahan sosial tidak hanya terdiri dari satu dimensi atau satu level masalah saja. Khususnya pada ketidaksetaraan gender, interseksionalitas merupakan dasar yang perlu diperhatikan. Melalui pemberdayaan yang multilevel dan multidimensi ini, permasalahan gender dan pemberdayaan perempuan dapat mencakup keseluruhan lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang.

### 3. Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan dalam pencapaian Agenda 2030. SDGs mencakup agenda pembangunan yang fokus pada manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kerja sama (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2022). SDGs hadir sebagai upaya transformasi terhadap kondisi dunia yang digambarkan dengan kemiskinan ekstrim. Kehadiran SDGs merupakan langkah untuk menciptakan pembangunan yang tidak hanya dapat diminati oleh generasi yang ada sekarang, melainkan juga untuk generasi mendatang. Kedudukan SDGs adalah sebagai kerangka hukum internasional yang menjadi instrumen bagi negara untuk bertindak dalam upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan dan target yang dibawa oleh SDGs merupakan kerangka yang saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2022). Meskipun berlaku sebagai tujuan global, SDGs tetap memperhatikan kondisi nasional yaitu berkaitan dengan kapasitas serta level pembangunan dan kerangka hukum yang berlaku secara nasional. SDGs tidak berjalan sebagai tujuan pembangunan pada tataran global semata, tetapi juga diinkorporasikan dalam proses pembangunan nasional yaitu melalui kebijakan dan strategi yang diambil.

Pembangunan berkelanjutan melalui SDGs adalah sebuah komitmen ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kelangsungan masa depan baik terhadap manusia dan lingkungannya (United Nations, 2012). SDGs menawarkan pembangunan ekonomi yang inklusif, menciptakan kesempatan kepada siapa saja, mereduksi ketimpangan, meningkatkan taraf hidup, pembangunan sosial yang inklusif, dan manajemen sumber daya alam untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang akan dinikmati oleh generasi kini dan yang akan datang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan tipe ini, peneliti berupaya untuk memahami dan memaknai fenomena yang diteliti dengan berinteraksi dengan individu yang terlibat dalam fenomena tersebut (Wekke, 2019; Yusuf, 2017). Melalui tipe penelitian ini pula, peneliti akan menjelaskan peran WRI dalam upaya mewujudkan SDGs Tujuan Kesetaraan Gender di Indonesia.

### **2. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung tanpa media perantara yang diambil melalui metode wawancara dan observasi terhadap objek penelitian.

Data berikutnya merupakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Adapun jenis data ini dapat diperoleh melalui studi literatur terhadap buku, artikel ilmiah, maupun media lain yang relevan terhadap penelitian ini.

### 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dan studi literatur. Adapun wawancara akan dilakukan kepada WRI sebagai objek dari penelitian ini serta individu atau kelompok lain yang kedudukannya relevan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data berikutnya dilakukan melalui studi literatur dengan mengkaji sumber-sumber relevan.

### 4. Analisis Data

Teknis analisis data yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah analisis model Miles dan Huberman. Analisis model ini memberikan kesempatan pada peneliti untuk menganalisis data sejak pengumpulan data dan dapat mengajukan pertanyaan kembali hingga mendapatkan fakta yang diperlukan untuk menghasilkan data kredibel (Sugiyono, 2013). Analisis terhadap permasalahan dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemui kemudian dihubungkan untuk menghasilkan argumen yang valid dalam hasil penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab dengan alur sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasan pada bab ini meliputi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pembahasan pada bab ini mendeskripsikan variabel penelitian serta konsep yang digunakan untuk mengkaji variabel penelitian. Adapun yang menjadi sub-bab pembahasan meliputi *Non-Governmental Organization*, pemberdayaan perempuan, dan *Sustainable Development Goals*..

Bab III NGO dalam Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. Pembahasan pada bab ini adalah menguraikan gambaran umum NGO dan relasi yang terbangun dengan aktor lainnya yaitu aktor negara. Bab ini akan digunakan untuk mendeskripsikan posisi Women Research Institute dalam konteks pemberdayaan perempuan, gambaran umum ketimpangan gender di Indonesia, serta upaya kesetaraan gender yang dilakukan di Indonesia.

Bab IV Peran Women Research Institute Indonesia dalam Mewujudkan Tujuan Kesetaraan Gender di Indonesia. Pembahasan pada bab ini akan menjawab pertanyaan penelitian yaitu strategi Women Research Institute Indonesia terhadap SDGs dan program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengarusutamaan kesetaraan gender.

Bab V Penutup. Bab ini menjadi bab terakhir dari penulisan penelitian dengan menguraikan kesimpulan yang diambil dari penyajian data yang dilakukan. Selain kesimpulan, uraian saran juga menjadi bagian dari penelitian

ini untuk mengorbitkan poin-poin yang sekiranya perlu diteliti lebih lanjut maupun langkah-langkah yang dapat diambil oleh aktor-aktor yang relevan dengan penelitian ini.

Adapun secara umum metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan deduktif. Melalui penulisan deduktif, data-data yang dikumpulkan akan disajikan dalam penulisan bersifat umum ke khusus untuk menggambarkan hasil penelitian yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian.

## **BAB II**

### **KERANGKA KONSEP**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Uraian penelitian terdahulu berfungsi untuk mengomparasi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat ditemukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Maksud dari perbedaan ini adalah untuk memberikan kebaruan penelitian khususnya dalam studi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat penulis gunakan sebagai pembandingan berjumlah empat penelitian dengan penjelasan sebagai berikut.

Pertama, ‘Peran Kerja Sama Bilateral Australia-Indonesia melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Tercapainya *Sustainable Development Goals* di Indonesia’ (Denimah, 2021) yang fokus penelitiannya adalah pada program MAMPU. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa program kerja sama bilateral tersebut telah memberikan dukungan setidaknya pada 7 tujuan dari 17 tujuan SDGs.

Kedua, ‘Peranan United Nations Women dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017’ (Artika Suri et al., 2020) yang membahas mengenai peran UN Women di Indonesia dalam pengentasan kasus kekerasan seksual. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa mitigasi yang dilakukan oleh UN Women mencakup

pemberian pelatihan bagi penyedia layanan perempuan korban kekerasan seksual dan memberikan pendampingan hukum.

Ketiga, ‘Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender di Tataran Lokal. Studi Kasus: Upaya Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Komunitas Perempuan Penyintas Kekerasan’ (Apresian et al., 2017) yang membahas tentang pemberdayaan bagi penyintas kekerasan seksual. Penelitian ini menggambarkan kompleksitas yang dihadapi dalam memberdayakan penyintas kekerasan seksual. Kritik terhadap indikator penetapan tujuan kesetaraan gender juga dinilai perlu karena penyesuaian indikator dibutuhkan untuk memungkinkan tercapainya kesetaraan gender pada level dan kondisi tertentu.

Keempat, ‘Analisis Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Soppeng’ (Nursyamsi & Muis, 2013) yang meneliti mengenai pemberdayaan perempuan di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini fokus pada aspek kuantitatif yang menyajikan data partisipasi perempuan di lintas sektor termasuk di bidang politik dengan menyajikan data keterwakilan perempuan dalam legislatif.

Kelima, ‘Aktivisme, Filantropi Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta: Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta’ (Widianto, 2018) yang meneliti tentang relevansi antara aktivisme Lembaga Swadaya Masyarakat dan filantropi sosial. Penelitian ini fokus pada aktivitas LSM yang dipengaruhi oleh aktivitas filantropi yang membentuk perubahan aktivisme LSM untuk menjadi lebih independen.

Dari kelima penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa pola yang diteliti sebagian besar fokus pada program, aktor, masalah, partisipasi, dan independensi dengan variabel yang beragam. Kelima penelitian menggunakan pendekatan gender namun tidak ada yang membahas mengenai kualitas program pemberdayaan meskipun tiga penelitian menggunakan variabel *Sustainable Development Goals*. Kelima penelitian tersebut juga tidak ada yang membahas relevansi dengan kebijakan negara dalam pengarusutamaan gender dengan menggunakan pendekatan terhadap organisasi. Meskipun pada penelitian kelima pendekatan terhadap LSM telah digunakan, fokus utama dari penelitian tersebut adalah pada gerakan filantropi sosial yang berkaitan dengan pendanaan dan independensi LSM.

Dengan melihat pola-pola di atas, melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk memberikan kebaruan terhadap studi gender di mana hingga saat ini peneliti belum menemukan penelitian dengan tema sentral NGO khususnya dengan objek penelitian Women Research Institute. Penelitian ini akan fokus pada upaya pemberdayaan dan pengarusutamaan gender yang dikhususkan pada aspek politik untuk melihat relasi NGO dengan pembuatan kebijakan terkait kesetaraan gender di Indonesia yang didasari oleh pemahaman bahwa Indonesia telah meratifikasi *Sustainable Development Goals* ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara nasional.

## B. Non-Governmental Organization

NGO sering diasumsikan dekat dengan masalah pembangunan, kegiatan kemanusiaan lingkungan, maupun hak asasi manusia. NGO juga dikategorikan sebagai grup operasional yang memiliki visi-misi serta sebagai grup advokasi untuk memengaruhi kebijakan (Willetts, 2011). Meskipun demikian, NGO tidak hanya beraktivitas berdasarkan identifikasi di atas. NGO juga melakukan aktivitas lainnya, di antaranya adalah kolaborasi profesional, pemberdayaan individu atau kelompok, serta promosi solidaritas komunal, kelas, gender, juga etnis.

Posisi NGO sering dilihat sebagai posisi yang strategis. Hal ini mengerucut pada bagaimana NGO dipahami sebagai salah satu aktor kunci yang diapresiasi dan diperhitungkan legitimasinya (Burke & Phelps, 2018). Legitimasi ini merupakan produk dari beberapa indikasi yang digambarkan oleh NGO sendiri. Poin yang dapat menggambarkan bagaimana NGO mendapatkan legitimasi dan kedudukannya diperhitungkan adalah strategi yang digunakan. Secara umum, NGO dalam hubungan internasional dikategorikan berdasarkan cara berinteraksi (strategi) dengan institusi lainnya. Kategori ini memunculkan dua bentuk utama yang dapat dilihat dari NGO, yaitu penggunaan strategi *insider* dan strategi *outsider*. Strategi *insider* dimaknai sebagai keterlibatan NGO dalam cakupan organisasi-organisasi yang dicirikan dengan strategi melobi pembuat kebijakan dan akses terhadap institusi. Sebaliknya, strategi *outsider* dicirikan dengan aktivitas kontras NGO, seperti konfrontasi, protes, dan boikot. Implikasi dari strategi yang digunakan adalah legasi yang didapatkan oleh NGO tersebut.

Penggambaran dan reputasi menjadi turunan dari legasi yang didapatkan melalui penerapan baik strategi *insider* maupun *outsider*.

Salah satu ciri yang dapat diidentifikasi dari NGO adalah sistem pendanaannya yang independen dari pemerintah. Sumber daya finansial untuk melaksanakan misi NGO dalam masyarakat salah satunya adalah melalui donor. Donor ini bisa datang baik dari level nasional ataupun internasional. Sistem pendanaan melalui donor yang datang dari luar negeri merupakan poin yang cukup penting dielaborasi. Hal ini disebabkan oleh aktivitas NGO yang pada level tertentu bersinggungan dengan politik. Di sisi lain, diketahui bahwa aktivitas NGO dan unsur ‘asing’ misalnya dari segi pendanaan menjadi alarm bagi institusi pemerintah. Upaya-upaya perlindungan terhadap pengaruh dari luar terhadap proses politik dan birokrasi menyebabkan negara yang dicirikan dengan pemerintah kemudian melakukan pembatasan-pembatasan untuk menekan pengaruh asing termasuk di dalamnya adalah melalui aturan-aturan pendanaan yang meliputi NGO.

Kondisi ini digambarkan dalam studi (Dupuy & Prakash, 2018; Watson & Burles, 2018) sebagai bentuk sekuritisasi pemerintah yang menanggapi pengaruh dari luar sebagai sebuah ancaman. NGO ditempatkan sebagai aktor yang perlu diwaspadai karena dianggap sebagai aktor fungsional yang akan membawa dan melaksanakan agenda perpanjangan tangan dari pendanaan yang diterimanya. Kewaspadaan ini kemudian diimplementasikan melalui regulasi terhadap NGO yang tidak hanya meliputi pendanaan. Regulasi ini juga dapat berbentuk keabsahan status NGO dalam beroperasi di masyarakat. Ketajaman

regulasi akan semakin mengerucut ketika NGO dianggap memiliki partisipasi yang mengancam status otoritas negara. Implikasi dari rasa terancam ini yang kemudian digambarkan melalui sistem aturan dan pembebanan kewajiban kepada NGO sebagai bentuk pembatasan negara dari keikutsertaan politik, khususnya dengan menempatkan pengaruh aktor luar yang akan memengaruhi urusan dalam negeri.

Kewaspadaan terhadap sistem pendanaan NGO yang diidentifikasi berafiliasi dengan pihak asing bukan merupakan kewaspadaan yang tidak berdasar. Studi (Dupuy & Prakash, 2018) menunjukkan bahwa bantuan dari donor dilandasi kepentingan donor, bukan kebutuhan penerimanya. Dalam hal ini, donor dari luar dianggap sebagai bentuk melanggengkan pengaruh kolonial terhadap penerimanya. Pengaruh ini yang kemudian diwaspadai akan terinfiltrasi melalui NGO yang dalam sebagian besar kondisi merupakan aktor kritikal terhadap pemerintah domestik.

Studi ini (Dupuy & Prakash, 2022) meskipun tidak menunjukkan adanya ketakutan terhadap pengaruh asing, namun tetap melihat poin yang menempatkan bantuan atau donor dari luar tersebut sebagai sesuatu yang tidak terlalu menguntungkan dari segi masyarakat. Dalam studi tersebut, dipaparkan bahwa NGO yang didanai melalui pihak asing cenderung kurang memiliki koneksi dengan masyarakat lokal yang posisinya ataupun kepentingannya berusaha diadvokasi oleh NGO. Dupuy dan Prakash melihat bahwa timbal balik dari aspek modal sosial tidak didapatkan oleh NGO karena koneksi yang tidak terbangun tersebut. Komunitas lokal melihat bahwa NGO dalam fungsi

advokasinya lebih membawa nilai yang dianggap penting oleh masyarakat Barat yang jika diaplikasikan terhadap komunitas-komunitas lainnya, khususnya pada komunitas lokal yang dalam studi ini mengambil sampel negara di Afrika dan Asia termasuk Indonesia, yang tentu saja tidak dapat disamakan karena berbagai faktor.

Dari penjelasan di atas, sejauh ini dapat dilihat bahwa interaksi NGO tidak hanya menasar pada target individu dan komunitas pada level masyarakat (Dupuy & Prakash, 2022). NGO juga berinteraksi dalam cakupan yang lebih sistemik melalui partisipasi secara politis yang tetap dilandasi dengan pandangan untuk merepresentasikan kelompok yang diwakilinya.

### **C. Pemberdayaan Perempuan**

Konsep pemberdayaan perempuan oleh para ahli secara umum diidentifikasi terjadi dalam dua bentuk. Bentuk pertama yaitu terjadi pada cakupan individual dan kedua terjadi pada cakupan kolektif. Adapun dalam tulisan ini akan digunakan pendapat menurut Huis, *et al.* (studi 2017), dan Santillan (studi 2004) berdasarkan kajian literatur (al Hakim *et al.*, 2022). Huis, *et al.* mendefinisikan pemberdayaan perempuan sebagai proses multifaset yang mencakup kesadaran individual maupun kolektif, kepercayaan (*beliefs*) dan nilai (*values*) dalam kehidupan sosial, struktur kultural, dan konteks. Adapun menurut Santillan, pemberdayaan perempuan dikarakterisasi sebagai proses pengembangan peraturan dan kebijakan yang memberikan kesempatan pada perempuan dan anak perempuan untuk menantang norma dan kondisi yang ada. Kedua definisi ini cukup menggambarkan pemberdayaan perempuan merupakan

sebagai sebuah proses yang mengumpulkan berbagai dimensi sosial dalam kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya upaya untuk mengidentifikasi kembali konstruksi sosial masyarakat terhadap pandangan pada perempuan.

Pemberdayaan perempuan selama beberapa dekade ini telah menjadi konsep yang dieksploitasi penggunaannya oleh berbagai agensi pada berbagai level, khususnya dalam topik pembangunan. Ester Boserup pada tahun 1970 pertama kali menggunakan istilah ini untuk menggambarkan pembangunan yang gagal mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan (Hyunanda et al., 2021). Kritiknya terhadap kegagalan pembangunan dalam membawa dampak positif terhadap kehidupan perempuan sebagai hasil dari marginalisasi perempuan dalam aktivitas ekonomi. Berangkat dari kritik ini, penggunaan pemberdayaan perempuan kemudian lebih erat digambarkan sebagai bagian dari proses ekonomi. Berangkat dari pemahaman ini berbagai kritik pada akhirnya bermunculan untuk menggarisbawahi kurangnya paparan aspek analisis kekuatan (*power analysis*) yang dianggap sebagai isu utama dari kondisi mengapa pemberdayaan perempuan seakan terlepas dari akarnya dan sekadar menjadi konsep tidak berarti yang acap kali digunakan dalam topik pembangunan. Salah satu kritik yang dipaparkan dalam studi ini adalah kritik oleh Balitwala yang menganggap bahwa pemberdayaan perempuan saat ini hanya menjadi *magic bullet* untuk pengentasan kemiskinan dibanding sebagai suatu cara untuk menginterogasi proses sosial yang kompleks.

Senada dengan studi Sen di atas, kritik juga difokuskan pada bagaimana pemberdayaan secara umum hanya dimaknai sebatas pada tenaga kerja

produktif-tidak produktif yang erat menciptakan citra pemberdayaan sebagai sebuah aktivitas ekonomi semata. Pemaknaan secara terbatas ini menciptakan kegagalan dalam memahami bahwa ketidaksetaraan yang tercipta secara struktural dalam kehidupan sosial merupakan produk dari simbol patriarki dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat (Cole, 2018). Kritik ini berusaha membawa pandangan bahwa aspek dasar yang seharusnya dapat menjadi landasan dari pemberdayaan khususnya pemberdayaan perempuan adalah melalui perubahan struktural itu sendiri. Implikasi dari kritik-kritik ini kemudian dapat dilihat dalam berbagai pembagian dari pemberdayaan. Secara umum, pemberdayaan dimaknai sebagai sebuah proses perubahan. Adapun turunan dari proses ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu pada level individu, komunitas, dan sistem. Pemberdayaan pada level individu dan komunitas dapat dikatakan berada pada cakupan yang kecil dibanding level sistematis. Pada level ini, pemberdayaan menuntut adanya perubahan kekuatan (*changing power*) untuk melakukan perubahan terhadap level di bawahnya. Pemberdayaan di level sistem menuntut terjadi perubahan melalui pemberdayaan politik yang dianggap sebagai elemen dasar pemberdayaan. Namun, pemberdayaan politik dipahami sebagai pemberdayaan yang paling sulit untuk dicapai.

Keinginan untuk menciptakan perubahan kekuatan melalui pemberdayaan politik pada level sistem tidak mudah seperti yang sudah dijelaskan. Akan tetapi, pemberdayaan perempuan bukan berarti tidak dapat dilakukan apabila fokus tidak lagi ditujukan pada level sistem. Pemanfaatan pemberdayaan perempuan pada level individu dan komunitas masih dapat

dilakukan secara maksimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Rowlands (al Hakim et al., 2022) yang menyebutkan bahwa pendekatan terhadap pemberdayaan perempuan dapat dilakukan secara *bottom-up*. Melalui model ini, perempuan diposisikan sebagai agen perubahan, bukan lagi sebagai penerima perubahan. Posisi perempuan tidak digambarkan bertindak pasif namun aktif.

Dalam penggambaran yang lebih khusus dalam kaca mata organisasi, studi (Sen, 2019) dalam menggambarkan bagaimana organisasi perempuan khususnya dalam upaya pencapaian Tujuan Kesetaraan Gender dari SDGs bertumpu pada proses pemberdayaan. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses yang dilandasi pemahaman bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan pendekatan terhadap hak asasi manusia dan mendukung organisasi perempuan serta pergerakan perempuan sebagai sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Studi ini menempatkan organisasi perempuan sebagai aktor kunci yang secara krusial dapat mendorong agenda kesetaraan gender.

Hasil studi (al Hakim et al., 2022) juga sejalan dengan studi Sen di atas dengan menunjukkan signifikansi peranan NGO dalam proses pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan dalam bentuk edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai utilisasi kapabilitas dan potensi perempuan dapat membantu perempuan mewujudkan harapan dan berjuang memperoleh haknya.

Partisipasi perempuan dalam politik menjadi salah satu pemberdayaan pada level individu dan komunitas yang dapat dilakukan. Partisipasi perempuan dalam politik idealnya didukung dengan kemampuan yang mumpuni. Partisipasi dari segi kuantitas saja tidak cukup. Diperlukan kualitas partisipasi yang mana

perempuan perlu diberdayakan. Fungsi pemberdayaan inilah yang kemudian yang akan diisi melalui peranan NGO. Studi (Kabir et al., 2018) terhadap partisipasi perempuan salah satunya di Bangladesh merekomendasikan bahwa NGO dapat mengisi kekosongan pemahaman terhadap partisipasi perempuan dalam sektor politik dengan memberikan pelatihan kepada anggota parlemen di tingkat pemerintah lokal. Pelatihan ini difokuskan pada pengembangan diri, kepemimpinan, dan pemberdayaan perempuan. Studi yang sama juga menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi bagian dari NGO ataupun berpartisipasi dalam program yang terafiliasi dengan NGO membantu perempuan untuk lebih vokal dan asertif dalam upaya pemenuhan hak-haknya. Kualitas partisipasi politik perempuan menunjukkan peranan NGO memiliki dampak positif dalam menghadapi masalah yang dihadapi.

Ketidaksetaraan gender menciptakan ketimpangan-ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Keterbatasan terhadap akses sumber daya dan proses politik pembuatan kebijakan dialami oleh perempuan. Terbukanya akses politik bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan tidak menjamin bahwa edukasi politik secara umum dan khususnya pada kewajiban politik telah dilaksanakan secara mumpuni (Kabir et al., 2018). Kondisi-kondisi seperti ini pada akhirnya membuat perempuan meskipun telah menempati posisi yang strategis dalam politik dan pembuatan kebijakan, tidak dapat membantu pengentasan ketidaksetaraan gender secara maksimal. Rintangan yang dihadapi perempuan dalam politik yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman politik

dan pengembangan diri serta sistem patriarki yang bahkan melekat pada institusi pemerintah membuat perempuan tetap berada pada posisi subordinat.

#### **D. Sustainable Development Goals**

*Sustainable Development Goals* merupakan kerangka acuan yang juga menjadi tujuan dari pembangunan global. Upaya untuk menciptakan pembangunan yang ramah baik manusia maupun lingkungan merupakan landasan utama dicetuskannya kerangka pembangunan global ini. SDGs bertindak sebagai tujuan yang ingin dicapai sekaligus sebagai penggerak dan cerminan bagaimana arah pembangunan global akan dibawa pada masa mendatang.

SDGs merupakan implementasi dari Agenda 2030 (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2022). Adapun secara rinci, Agenda 2030 merupakan upaya transformasi dunia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Agenda ini bertujuan untuk menguatkan kondisi perdamaian universal, mengentaskan kemiskinan, menciptakan lingkungan (planet) yang sehat, mengupayakan perwujudan hak asasi manusia, serta bertindak sebagai langkah transformatif untuk menciptakan pembangunan yang adil dan merata sehingga tidak ada bagian yang terus berada dalam posisi tertinggal serta mencapai kesetaraan gender dan menghasilkan perempuan yang berdaya.

Beberapa visi dari Agenda 2030 yang relevan dengan topik tulisan ini adalah upaya untuk menciptakan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi, fokus pada pengembangan potensi manusia yang nantinya akan berkontribusi

terhadap kesejahteraan secara kolektif. Berikutnya adalah visi untuk menciptakan kondisi bagi perempuan dan anak perempuan (*women and girls*) agar dapat menikmati kesetaraan gender dan menjadi individu yang berdaya.

Perjalanan SDGs tidak dimulai ketika Agenda 2030 disepakati. Lebih dari itu, nilai-nilai yang dibawa agenda ini sudah disepakati sejak masa MDGs yang kemudian dilanjutkan oleh SDGs (United Nations, 2022). Perjalanan SDGs dapat diidentifikasi sejak 1992 pada Earth Summit ketika lebih dari 178 negara mengadopsi Agenda 21 sebagai rencana aksi dalam kerja sama global untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dan melindungi lingkungan. Kemudian pada tahun 2000 melalui Millennium Summit, negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi *Millennium Declaration* yang terdiri atas delapan (8) tujuan millennium (Millennium Development Goals) dengan kemiskinan yang akan direduksi hingga 2015. Pada 2012, *United Nations Conference on Sustainable Development/Rio+20* semakin menunjukkan titik terang perjalanan SDGs. Konferensi ini mengadopsi dokumen *The Future We Want* yang kemudian menjadi landasan utama dalam membangun SDGs sebagai lanjutan dari upaya untuk penyelesaian masalah yang masih membayangi MDGs. Konferensi ini juga sekaligus menghadirkan forum politik untuk mewujudkan SDGs melalui *UN High-level Political Forum on Sustainable Development*. Sejak 2013, proposal SDGs dibuat dan kemudian pada 2015 melalui UN Sustainable Development Summit, Agenda 2030 disepakati dan tujuh belas tujuan menjadi acuan untuk mewujudkan agenda global tersebut.

Tujuan pembangunan yang dibawa oleh SDGs terdiri atas tujuh belas (17) tujuan dan seratus enam puluh sembilan (169) target yang menjadi kelanjutan dari *Millennium Development Goals* yang berakhir pada 2015 (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2022). SDGs dapat disebut sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang belum berhasil diselesaikan selama MDGs berjalan. Adapun ketujuh belas target dari SDGs adalah 1) Menghapus Kemiskinan; 2) Mengakhiri Kelaparan; 3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan Bermutu; 5) Kesetaraan Gender; 6) Akses Air Bersih dan Sanitasi; 7) Energi Bersih dan Terjangkau; 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 9) Infrastruktur Industri, dan Inovasi; 10) Mengurangi Ketimpangan; 11) Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan; 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; 13) Penanganan Perubahan Iklim; 14) Menjaga Ekosistem Laut; 15) Menjaga Ekosistem Darat; 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat; serta 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Dalam tulisan ini, fokus yang akan digunakan adalah Tujuan 5, yaitu Kesetaraan Gender.

SDGs dijalankan dalam berbagai level (United Nations, 1992). Implementasi SDGs dilakukan pada level global, nasional, dan regional. Pada level nasional, implementasi berkaitan erat dengan kondisi masing-masing negara. SDGs menitikberatkan pada implementasi tujuan yang sejalan dengan aspek-aspek nasional, sehingga dalam hal ini perbedaan di setiap negara dipahami sebagai sebuah kondisi yang tidak terelakkan. Implikasi dari kondisi ini adalah, SDGs melihat aspek lokal termasuk aktor-aktor dalam cakupan

nasional yang berperan dalam penyelenggaraan SDGs. Secara khusus, pada aspek regional, SDGs melihat bahwa komponen lokal dari setiap wilayah dapat berkontribusi satu sama lain untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama. Level regional dan sub-regional membuka kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dari proses pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Salah satu upaya transformasi yang paling signifikan adalah bagaimana SDGs sebagai kelanjutan dari MDGs menawarkan upaya kesetaraan gender yang lebih holistik. Meskipun keduanya membawa semangat kesetaraan gender, penyelenggaraan MDGs masih bersifat umum sedangkan melalui SDGs, kesetaraan gender menjadi lebih spesifik dengan target yang lebih banyak pula. Tujuan 3 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada MDGs memiliki satu target utama, yaitu mengeliminasi disparitas gender secara khusus dalam aspek pendidikan (Asian Development Goals, 2015). Berbeda dengan Tujuan 3 MDGs, Tujuan 5 Kesetaraan Gender dalam SDGs memiliki sembilan target. Target-target tersebut adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi pada perempuan dan anak perempuan;
2. Mengakhiri praktik-praktik yang berbahaya terhadap perempuan;
3. Merekognisi pekerjaan domestik dan pekerjaan merawat yang tidak dibayar;
4. Memastikan partisipasi perempuan secara penuh dan efektif serta kepemimpinan perempuan;
5. Mengupayakan akses kesehatan seksual dan reproduksi;

6. Meningkatkan kesempatan perempuan untuk mengakses sumber daya ekonomi dan kepemilikan aset;
7. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk mendukung pemberdayaan; dan
8. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Kesetaraan gender dalam UN Conference on Sustainable Development merekognisi peranan vital perempuan khususnya dalam partisipasi di berbagai bidang dan mendukung kepemimpinan perempuan. Kesetaraan gender harus dipromosikan tidak hanya pada berbagai aspek kehidupan, tetapi juga pada berbagai level. Oleh sebab itu, dalam konferensi ini kesetaraan gender tidak lagi hanya fokus pada edukasi seperti pada MDGs, melainkan juga menjajaki aspek ekonomi, pengambilan kebijakan, kesehatan, serta akses informasi dan teknologi. Pembangunan berkelanjutan akan berjalan dengan efektif ketika kesetaraan gender diintegrasikan dalam berbagai lini kehidupan.